



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TANJUNGBALAI
DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TANJUNGBALAI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN TENTANG KEPEMILUAN DAN
PENCEGAHAN TERHADAP MONEY POLITIK

NOMOR: ~~0001~~PM.04/K.SU/01/2022

NOMOR: ~~001~~/DP-2/MUI-TB/I/2022

Dengan rahmat Allah yang maha Esa dan didasari dengan keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh dua (27-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dedy Hendrawan, SH.,MH** : Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung balai. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Km 3.5 Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Hajarul Aswadi, S.Pd.I** : Dalam jabatan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai, yang beralamat di Jalan Gaharu, Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang disebut nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah nota kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pelatihan;
2. Bidang pemanfaatan sarana dan prasarana;
3. Bidang pemanfaatan sumber daya;
4. Pengawasan Partisipatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Tanjungbalai untuk memilih;
5. Pendidikan tentang Kepemiluan dan Pemilihan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai terhadap pencegahan money poliitik;

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan nota kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak

dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan nota kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan sendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban para pihak ini **PARA PIHAK** ini akan di musyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAI 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 8 LAIN-LAIN

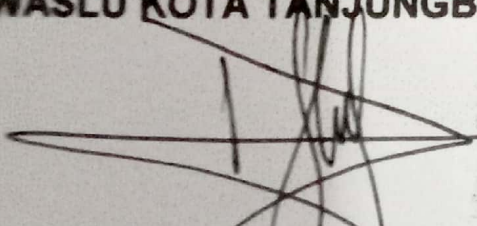
1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

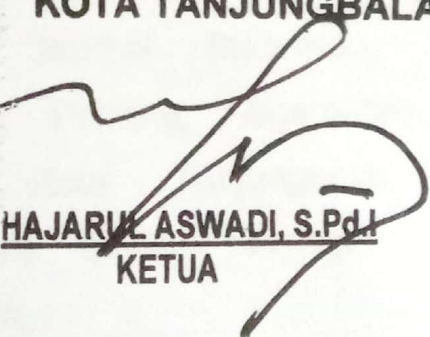
PIHAK PERTAMA

BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI


DEDY HENDRAWAN, SH.,MH
KETUA

PIHAK KEDUA

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA TANJUNGBALAI**


HAJARUL ASWADI, S.Pd.I
KETUA

